

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP AKAD BAGI  
HASIL DENGAN SISTEM POINT DALAM USAHA RUMAH MAKAN  
(Studi di Restoran Garuda Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**AYU WULANDARI  
NPM. 1621030337**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP AKAD BAGI  
HASIL DENGAN SISTEM POINT DALAM USAHA RUMAH MAKAN  
(Studi di Restoran Garuda Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**AYU WULANDARI  
NPM. 1621030337**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Salah satunya adalah mengatur tentang cara memperoleh nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam juga dijelaskan berbagai cara memperoleh harta dengan jalan yang baik dan halal seperti berdagang, sewa menyewa, bagi hasil dan lain-lain. Salah satu usaha yang paling menonjol di zaman sekarang adalah usaha kuliner. Adapun usaha rumah makan yang sampai saat ini menjadi salah satu usaha yang diminati oleh masyarakat dan satu-satunya di Bandar Lampung yaitu Restoran Garuda. Restoran Garuda, merupakan usaha rumah makan yang menyajikan berbagai makanan khas kota Padang atau Minang. Menariknya, dalam hal operasional Restoran Garuda memiliki sistem yang membuatnya berbeda dengan rumah makan ataupun jenis usaha lainnya. Restoran Garuda menyebutnya dengan istilah sistem *Point*. Sistem *point* merupakan sistem bagi hasil usaha yang digunakan oleh Restoran Garuda dalam usahanya. Restoran Garuda menggunakan sistem *point* sebagai pedoman penghitungan hasil usaha kepada karyawan, hal ini dinilai dari cara kerja dan seberapa giat karyawan itu bekerja, serta berdasarkan posisi yang dihitung selama 60 hari (2 bulan) sekali. Artinya, setiap karyawan memperoleh pendapatan yang berbeda-beda tergantung pendapatan yang diperoleh Restoran Garuda selama 60 hari kerja dan dibagi sesuai kesepakatan antara pengelola restoran dengan karyawan. Dalam pelaksanaan berdasarkan kesepakatannya sistem bagi hasil ini dilakukan dalam bentuk lisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) Mengapa terjadi Praktik Akad Bagi Hasil dengan sistem *point* di Restoran Garuda, Bandar Lampung?, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akad bagi hasil dengan sistem *point* di Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini yaitu; 1) Untuk mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Restoran Garuda terhadap karyawannya dengan sistem *point*, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis praktik bagi hasil dengan sistem *point* di rumah makan Restoran Garuda menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak karyawan dan pemilik restoran Garuda. Sedangkan data sekunder dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pihak lain yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil peneliti menunjukkan bahwa, praktik seperti itu adalah dibenarkan karena terpenuhinya rukun dan syarat akad bagi hasil (*mudharabah*), meskipun dijalankan usaha itu dengan sistem *point*. Tetapi sebaliknya, jika tidak terpenuhi rukun dan syarat bagi hasil, maka akadnya dipandang tidak sah, yang berarti tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah umum muamalah, yaitu antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Di mana, dalam kesepakatannya harus sama-sama rela, menepati akad perjanjian, dilarang adanya unsur penipuan, permainan (*maisir*), dan diharuskan adanya keadilan bagi pihak-pihak yang melakukan kesepakatan tersebut.

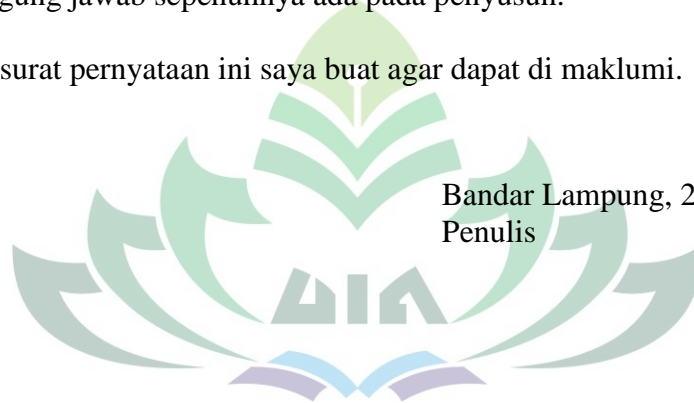
## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Wulandari  
NPM : 1621030337  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Bagi Hasil dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan (Studi di Restoran Garuda Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.



Bandar Lampung, 23 Juni 2020  
Penulis

**Ayu Wulandari**  
**NPM. 1621030337**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan (Studi di Restoran Garuda Bandar Lampung)**

**Nama : Ayu Wulandari**

**NPM : 1621030337**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'alah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP. 196003291987031003**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197308162003122003**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP AKAD BAGI HASIL DENGAN SISTEM POINT DALAM  
USAHA RUMAH MAKAN (Studi di Restoran Garuda Bandar Lampung)"**

disusun oleh, **Ayu Wulandari, NPM: 1621030337**, program studi Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 07  
September 2020.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

  
(.....)

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

  
(.....)

**Penguji Utama : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

  
(.....)

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

  
(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

(Q.S Al-Muzzammil (73) : 20)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang tanpa henti memberikan ilmu dengan tumpahan keringat, doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna yaitu:

1. Ayahanda Maspu Purwanto (Alm) dan Ibundaku Eli Rusmi tercinta.

Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terimakasih untuk setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran, kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.

2. Kakak-kakak sekaligus orang tua keduaku tersayang, mba Janah beserta suami Mamas Aska Huda, terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan kepada adik bungsu kalian.

3. Seluruh keluarga, kakak ipar, keponakan dan saudara-saudara yang telah mendukung serta mendoakan saya.

4. Pada al-Mamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Ayu Wulandari lahir pada tanggal 15 November 1995 Brebes, anak ke tujuh dari tujuh bersaudara, buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan bapak Maspu Purwanto (Alm) dan ibu Eli Rusmi Wardianingsih. Menempuh pendidikan di mulai dari SD Negeri 1 Luwunragi Brebes dan selesai pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Wanasari Brebes dan selesai pada tahun 2012, SMK Bhakti Utama Bandar Lampung selesai pada tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung di mulai pada semester I Tahun Akademik 1439 H / 2016 M.



Bandar Lampung, 23 Juni 2020  
Yang Membuat,

Ayu Wulandari

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Di Restoran Garuda Bandar Lampung )"**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.SI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Maimun, S.H., M.A. yang selalu memberikan motivasi semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. yang dengan sabar membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya;
9. Sahabat-sahabat tersayang Reni, Tia, Hesty, Ismel, dan Fadilah, yang telah menemani penulis dalam suka dan duka mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah F dan seluruh teman angkatan 2016. Terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
11. Saudara-saudara KKN 75 Sambikarto ku yang tidak bisa kusebut satu persatu terimakasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan.



Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah- mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, 23 Juni 2020



Ayu Wulandari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10

### BAB II KAJIAN TEORI

1. Konsep Akad <i>Mudharabah</i> dan Masalahnya	
a. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> .....	16
b. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i> .....	19
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i> .....	24
d. Macam-macam Akad <i>Mudharabah</i> .....	32
e. Pelaksanaan Sistem Point.....	35
f. Prinsip-prinsip Akad <i>Mudharabah</i> .....	36
g. Hikmah Disyariatkan <i>Mudharabah</i> .....	40
h. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	45
2. Konsep <i>Ijarah</i> dan Masalahnya	
a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	54
b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	56
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	59
d. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	64
e. Hak dan Kewajiban <i>Musta'jir</i> dan <i>Mu'ajir</i> .....	65
f. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	66
3. Tinjauan Pustaka .....	67

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Restoran Garuda	
1. Sejarah Berdirinya Restoran Garuda.....	74
2. Letak Geografis Restoran Garuda.....	76
3. Struktur Organisasi Pengelola Restoran Garuda.....	77
4. Daftar Menu Makanan .....	81
B. Praktik Sistem Point .....	83

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Akad Bagi Hasil dengan Sistem Point di Restoran Garuda, Bandar Lampung .....	90
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil dengan Sistem Point di Restoran Garuda, Bandar Lampung..	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Stuktur Organisasi Pengelola Restoran Garuda Bandar Lampung .....	78
2. Daftar Menu Makanan Restoran Garuda Bandar Lampung .....	82
3. Daftar Minuman Restoran Garuda Bandar Lampung .....	83



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan informasi dan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan (Studi di Restoran Garuda Bandar Lampung)” untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran, maka akan diuraikan secara singkat tentang istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hasan Alwi, Dendi Sugono, *Bahasa dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 6.

Hukum ekonomi syari'ah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam menurut Syafi'iyah, yaitu ilmu pengetahuan, mengenai hukum perilaku mukallaf secara syara' yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia yakni Fiqh Muamalah.<sup>3</sup>

Kata '*aqad*' dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.<sup>4</sup> Menurut ulama Fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta : Prenadamedia Group, cet Ke-1, 2019), h. 2.

<sup>3</sup> Ismail Muhammad Syeh, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 17-18.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammadiyah Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.15.



Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>5</sup>

Sistem bagi hasil (*mudharabah*) adalah seperangkat metode yang secara teratur saling berkaitan dari perjanjian kerjasama antara dua orang atau antara pemilik modal dengan yang menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan menyepakati kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian.

Sistem *point* adalah suatu sistem kerjasama, antara pemilik dengan pengelola rumah makan, tetapi juga sistem ini di terapkan dengan para karyawan. Di mana sistem kerja dari *point* ini adalah membagi keuntungan antara pemilik dan pengelola serta karyawan dalam kurun waktu 60 hari (2 bulan) kerja.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum dalam akad bagi hasil sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu berdasarkan sistem *point*, dikaji menggunakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT, dibahas secara mendalam dilihat dari tinjauan hukum ekonomi

---

<sup>5</sup>Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2002), h. 71-72.

syari'ah terhadap akad bagi hasil dengan sistem point dalam usaha rumah makan, yang terjadi pada Restoran Garuda, Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan peneliti memilih judul skripsi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil dengan Sistem Point dalam Usaha Rumah Makan di Restoran Garuda sebagai berikut:

1. Alasan Objektif, karena dalam praktiknya, ada kejanggalan mengenai sistem akad bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola restoran kepada karyawan, yakni pembayaran gaji yang didasarkan pada sistem *point* dengan demikian pembayaran gaji juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi.
2. Alasan Subjektif
  - a. Dalam membahas masalah penelitian ini didukung oleh data yang akurat yang terdapat di perpustakaan maupun yang diperoleh dilapangan sesuai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik peneliti, sehingga diduga kuat dalam penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
  - b. Pembahasan masalah penelitian ini sangat relevan dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah

SAW. Salah satunya adalah mengatur tentang cara memperoleh nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>6</sup>

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya ada yang memiliki harta yang lebih, namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, sebagian lainnya tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Sehingga kedua keterampilan tersebut saling membutuhkan untuk menghasilkan hal yang bermanfaat, untuk mengembangkan modal yang sudah dimiliki.<sup>7</sup>

Kerjasama adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalat yang di dalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya.<sup>8</sup> Menurut pengertian umum, *muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>9</sup>

Dalam Islam sudah dijelaskan berbagai cara memperoleh harta dengan jalan yang baik dan halal seperti berdagang, sewa menyewa

---

<sup>6</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.3.

<sup>7</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib fi Al-Mua'malah* (Mataram: CV Sanabil, 2015), h.185.

<sup>8</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h.102.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.2.



dan bagi hasil. Hal tersebut sudah sejalan dengan perintah Allah SWT, bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bertebaran mencari rizki dimuka bumi. Firman Allah SWT dalam Q.S *al-Baqarah* (2): 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil dari perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Namun kebolehan berbisnis tersebut tetap terikat hukum-hukum syara’ yang lain, dan tidak boleh melanggar ketentuan syariat.

Salah satu usaha yang paling menonjol di zaman sekarang adalah kuliner. Hal ini disebabkan karena rumah makan berkembang dengan pesat karena banyaknya persaingan di wilayah yang ada di Bandar Lampung. Adapun rumah makan yang sampai saat ini menjadi

salah satu kuliner yang diminati pengunjung dan satu-satunya di Bandar Lampung.

Restoran Garuda merupakan sebuah usaha rumah makan yang menyajikan berbagai makanan khas Kota Padang, macam-macam menu yang disajikan yaitu ayam goreng, ikan nila goreng, sayur mayur dan lain-lain. Disediakan juga berbagai macam minuman-minuman seperti es teh, es jeruk dan masih banyak lagi.

Menariknya, dalam hal Operasional Restoran Garuda memiliki sistem yang membuatnya berbeda dengan rumah makan ataupun jenis usaha lainnya. Restoran Garuda ini menyebutnya dengan istilah sistem “*Point*”. Sistem *Point* merupakan sistem bagi hasil usaha yang digunakan oleh rumah makan padang dalam usahanya. Dalam usahanya *point* setiap karyawan berbeda, hal ini dinilai dari cara kerja dan seberapa giat karyawan itu berkerja serta pada posisi atau peran dan kinerjanya. Sebagai contoh, seorang juru masak memiliki *point* yang lebih besar dari pelayan makanan, karena tugasnya lebih rumit yaitu menjamin kualitas cita rasa makanan supaya mempertahankan khas makanan Minangkabau namun tetap disukai oleh konsumen. *Point* digunakan sebagai dasar menghitung pembagian keuntungan kemasing-masing karyawan. Sistem *Point* berbeda dengan sistem gaji atau upah bulanan karena pembagian keuntungannya dilakukan setiap 60 hari (2 bulan) sekali.

Restoran Garuda menggunakan sistem *Point* sebagai pedoman penghitungan hasil usaha kepada karyawan berdasarkan posisi dan kinerja yang dihitung selama 60 hari. Artinya, setiap karyawan memperoleh pendapatan berbeda-beda tergantung pendapatan yang diperoleh Restoran Garuda selama 60 hari kerja dan dibagi sesuai kesepakatan antara pengelola restoran dengan karyawan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan pembayaran gaji karyawan di Restoran Garuda ini kelihatanya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, pemilik rumah makan tidak memberitahukan berapa besar gaji yang akan didapatkan oleh karyawan setiap bulannya, pemilik Restoran Garuda ini hanya memberitahukan sistem gajinya saja yaitu dengan Sistem Bagi hasil namun ditentukannya gaji karyawan menggunakan sistem *Point*. Dalam pelaksanaan berdasarkan kesepakatannya sistem bagi hasil ini dilakukan dalam bentuk lisan. Sedangkan menurut hukum Islam menetapkan upah atau gaji seseorang harus ditentukan diawal akad, tetapi yang terjadi dilapangan karyawan hanya diberitahukan sistem gaji yang diperoleh selama 60 hari (2 bulan) menggunakan akad bagi hasil yang ditentukan dengan sistem point.

Latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh terkait praktik sistem bagi hasil yang ada di Restoran Garuda dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah

---

<sup>10</sup>Rina Agustina, wawancara dengan penulis, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 17 Februari 2020.

Terhadap Akad Bagi Hasil Dengan Sistem Point Dalam Usaha Rumah Makan (Studi di Restoran Garuda Bandar Lampung).”

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari berbagai permasalahan yang ada maka yang menjadi fokus penelitian di sini adalah sekitar praktik akad bagi hasil dengan sistem *point* di Restoran Garuda Bandar Lampung. Maka dalam rencana penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada masalah tersebut.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi praktik akad bagi hasil dengan sistem point di Restoran Garuda Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad bagi hasil dengan sistem point di Restoran Garuda Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Restoran Garuda terhadap karyawannya dengan sistem *point*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik bagi hasil dengan sistem *point* di rumah makan Restoran Garuda menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

## G. Signifikasi Penelitian

1. Secara teori, dari rencana penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti karena dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem akad bagi hasil dengan sistem *point*. Di samping itu, dapat memberikan pemahaman mengenai bagi hasil dengan sistem *point* sesuai dengan Fiqh Muamalah. Sekaligus diharapkan juga sebagai konseptual bagi perkembangan di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat bahwa usaha dalam bentuk sistem *point* itu mesti sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap di mulai dengan penentuan suatu topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>11</sup> Dalam hal ini, metode penelitian yang dimaksudkan berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif yang bersifat *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan

---

<sup>11</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), h.2-3.



untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan melalui cara yaitu pengamatan, dan wawancara.<sup>12</sup> Dari berbagai informasi yang berkaitan, dari buku-buku yang membahas tentang bagi hasil yang terkhususkan pada bagi hasil dengan sistem point.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau memaparkan data-data penelitian yang kategori kualitatif, maka dalam hal ini untuk mengetahui masalah pelaksanaan praktik akad bagi hasil berdasarkan sistem *point*. Dengan cara melakukan analisis terhadap bagi hasil karyawan pada Restoran Garuda di Bandar Lampung.<sup>13</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

### 1) Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan atau objek penelitian. Dalam hal objek yang akan diteliti peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara di mana berisi data tentang data lapangan tempat penelitian. Serta diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h.50-51.

<sup>13</sup>Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h.26.

<sup>14</sup>Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.27.

## 2) Sumber Data

Sumber data di sini adalah membahas terkait sistem akad bagi hasil dengan sistem *point*, karena penelitian ini bersifat *field reasearch* maka sumber data penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu data yang dikumpulkan terlebih dahulu yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung melalui subjek penelitian, yang bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain Al-Qur'an, al-Hadist, dan pengamatan secara langsung.<sup>15</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup>

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.29.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 2004), h. 82.

ditarik kesimpulan.<sup>17</sup> Populasi di sini adalah karyawan rumah makan Restoran Garuda Bandar Lampung.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti sehingga dapat mewakili populasi.<sup>18</sup> Sampel dalam penelitian ini jumlah keluruhannya ada 27, karena dari jumlah keseluruhan itu tidak memungkinkan untuk bisa dimintai informasi, maka dalam penelitian ini menggunakan istilah *proposive sampling* yaitu teknik pengambilan secara sengaja di mana peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil.<sup>19</sup> Sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. 1 pengelola, 1 kasir dan 4 karyawan bagian dalam.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki.<sup>20</sup> Observasi yang dilakukan pada penelitian ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

<sup>18</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.74.

<sup>19</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, cet Ke-4, 2017), h.369.

<sup>20</sup>Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.70.

data yang sesungguhnya dari interview terhadap pengelola restoran dan para karyawan.<sup>21</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau berupa catatan, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung untuk mendapat bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.<sup>22</sup>

c. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara terbuka di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai pengelola dan beberapa karyawan di Restoran Garuda.

## 6. Metode Pengolahan Data

Menurut Lexy J. Moleong bahwa melakukan analisis data yang baik adalah membutuhkan pengolahan data secara sistematis dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengolahan data

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Reneka Cipta, 2012), h.188.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Reneka Cipta, 2012), h.188.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h.83.

tersebut sekurang-kurangnya dapat dilakukan secara manual, yakni menyusun data dalam beberapa kategori menurut kriteria yang diambil secara logis dan masalah yang akan dipecahkan. Adapun secara teknis, dilakukan dengan menyeleksi data yang valid dan tidak valid, memilih data yang valid yang relevan dengan fokus masalah penelitian, disusun secara kronologis dan sistematis.

## **7. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>24</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu bagi hasil dengan sistem *point* dalam tinjauan hukum Islam, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan teori bagi hasil, dengan pola berfikir induktif yaitu hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum.

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), h.145.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 1. Konsep *Mudharabah* dan Masalahnya

##### a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Kata '*aqad*' dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.<sup>25</sup> Menurut ulama Fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>26</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *I-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah SWT.

*Mudharabah* disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *qardhu* yang berarti *qath* (potongan), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammadiyah Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.15.

<sup>26</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2002), h. 71-72.

mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan secara terminologi *mudharabah* diartikan sebagai akad menyerahkan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya dimiliki bersama anantara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.<sup>27</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *ad-dharab* yaitu berpergian untuk urusan dagang.<sup>28</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muzzammil (73):20 yaitu:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

*Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama *shahibul mal* yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola menyediakan keahliannya.

Menurut istilah *mudharabah* adalah perjanjian yang melibatkan antara dua orang, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*)

<sup>27</sup>Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perseptif Hukum, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h. 194-195.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan kamaluddin A Marzuki, Jilid XIII (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 36.

untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian.<sup>29</sup>

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut;
- 2) Menurut Malikiyah, *mudharabah* adalah pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.
- 3) Menurut Hambali, *mudharabah* ialah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 4) Menurut Syafi'iyah, *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *Mudharabah* ditijarkan.
- 5) Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah

---

<sup>29</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-ke 3, 2008), h. 91.

uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>30</sup>

*Mudharabah* atau penanaman modal ini artinya menyerahkan atau memberikan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak kedua yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi satu sama lain.<sup>31</sup>

Beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

#### **b. Dasar Hukum Akad *Mudharabah***

Islam itu membolehkan kepada umatnya untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia lainnya. Sebagai manusia atau orang memiliki sebagian harta, akan tetapi dia orang yang lemah dan kemampuannya untuk menjadikannya harta kembali. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam untuk bermuamalah, agar ke dua belah pihak tersebut bisa masing-masing mengambil manfaatnya.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XIII (Bandung: AL Ma'arif, 1997), h. 37.

<sup>31</sup>Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daruq Haq, 2008), h.168.

Melakukan *mudharabah* hukumnya mubah (boleh), Adapun dasar hukum *mudharabah* yang disyari'atkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Al- Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5):1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ ءَلَّا نَعْمَرَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak mengahalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendak”.

Q.S Al-Baqarah potongan dari ayat 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ

Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan



amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

Potongan Q.S Al-Muzzammil (73):20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Q.S Al-Jumu'ah (62):10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila shallat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Q.S Al-Baqarah (2):198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Q.S An-Nisa (4):29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.

## 2) Hadist

Dasar hukum *mudharabah* yang kedua adalah al sunnah. Selain al-Qur'an, hadist sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang *mudharabah*, atau *Qiradh*. Adapun hadist tentang *mudharabah* yaitu hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً  
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا  
يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّزَهُ (رواه الطبراني  
في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya : “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu

dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (H.R Thabrani dari Ibnu Abbas).

### 3) *Ijma'*

*Mudharabah* disyari'atkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya. Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikam oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian beliau menjadi Nabi.<sup>32</sup>

### 4) *Qiyas*

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia juga ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di

---

<sup>32</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.226.

sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>33</sup> Dengan adanya kerja sama kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>34</sup>

### c. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Rukun dan syarat *Mudharabah* merupakan hal yang sangat penting, karena *Mudharabah* yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad kerjasamanya tersebut akan dinilai tidak sah atau batal hukumnya.

#### 1) Rukun Bagi Hasil

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan tersebut.<sup>35</sup>

Keterangan tersebut dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lainnya,

<sup>33</sup>Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h.191.

<sup>34</sup>Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.370.

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h.246.

yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *mudharabah*.

Rukun kerjasama *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c) Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e) *Amal*, yaitu pekerjaan si pengelola harta sehingga dengan pengelola dan.
- f) Keuntungan.<sup>36</sup>

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah *jaiz*. Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- a) Modal.
- b) Amal.
- c) Laba.
- d) Pihak yang mengadakan perjanjian.
- e) *Shiqat* (ijab dan *qabul*).

Menurut Jumhur Ulama, rukun *mudharabah* sebagai berikut:

- (1) *Aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola.

---

<sup>36</sup>Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah...*, h.199.



(2) *Ma'qud 'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerja) dan keuntungan

(3) *Siqat* yaitu ijab dan *qabul*.<sup>37</sup>

Menurut Zuhayli, akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai kesahannya, yaitu:

- (a) Pemilik dana (*Shahibul Mal*).
- (b) Pengelola (*mudharib*).
- (c) Ucapan terima kasih (*shigat ijab wa qabul*).
- (d) Modal (*ra'sul mal*).
- (e) Pekerjaan.
- (f) Keuntungan.<sup>38</sup>

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya *mudharabah* sebagai berikut<sup>39</sup>:

1. Pemilik modal (*rabbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa ada paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

<sup>37</sup>Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.371.

<sup>38</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.92.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h.246.

2. Objek kerjasama atau modal dan syaratnya harus dalam bentuk uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan terimakan pada waktu berlangsung akad.
3. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar presentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik dalam sesuatu yang pasti.

Menurut Abdullah Al-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak di sini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompensasi beraktifitas, yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut, terlilit utang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

- b. Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha, dan keuntungan.

### 1) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali, bila sudah disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

### 2) Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba atau yang sejenisnya.

### 3) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan melalui presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara

sisanya untuk pihak lain, maka itulah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerjasama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerjasama bagi hasil yaitu:

- a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- b) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagian dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, tetapi agar hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

c. Pelafalan akad

Pelafalan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab *qabul* atau *siqat* akad. Pelafalan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau juga tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 232 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun bagi hasil terbagi menjadi tiga yaitu:

1) *Shohibul Maal*.

2) *Mudharib*.

3) Akad.<sup>41</sup>

2) Syarat-syarat *mudharabah* yaitu:

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.

Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batang, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, bagi hasil tersebut batal.

b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf* (penyerahan/pengembalian), maka dibatalkan

<sup>40</sup>Abdullah Al-Mushlih, Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daruq Haq, 2008), h.170-178.

<sup>41</sup>Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teori dan Praktis* (Bandung: Pena, 2012), h.158.

anak-anak yang masih kecil, orang gila atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Keuntungan yang akan menjadi pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya akan menyerahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dari pengelola.
- f) Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di lain waktu tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad bagi hasil, yaitu keuntungan. Bila di dalam bagi hasil ada persyaratan-persyaratan, maka bagi hasil tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat As-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hambal, bagi hasil tersebut sah.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.197.



Menurut syarat-syarat Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- (1) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, jika penyerahan ditunda, maka *mudharabah fasid*.
- (2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak ada *mudharabah* dengan modal tidak jelas jumlahnya.
- (3) Modal yang dipertanggung jawabkan kepada pengelola.
- (4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cek maupun bukan.
- (5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- (6) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaan.
- (7) Tidak menunda-nunda waktu.

#### **d. Macam-macam Akad *Mudharabah***

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqh, tokoh-tokoh dalam bidang fiqh muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu:

##### **1) *Mudharabah Muthlaqah***

Akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad

ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul maal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.<sup>43</sup> Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shohibul maal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau memperdagangkan minuman keras (sekali pun diperbolehkan atau diizinkan resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan, tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata *mudharib* melakukan kelainan atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang

---

<sup>43</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1994), h.1197.

ditimbulkannya.<sup>44</sup> Dengan demikian maka hal tersebut jelaslah bahwa *mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan atau disepakati diawal akad perjanjian.
- 2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi pemilik modal diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan di dalam usahanya tersebut. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasannya. Baik itu mengenai tempat, tujuan ataupun jenis usahanya.

## 2) *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

*Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal.<sup>45</sup> Dalam jumlah dana dan nisbah bagi hasil yang keseluruhannya berdasarkan kontrak yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidaklah bebas

<sup>44</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: rajawali Press, 2010), h.149.

<sup>45</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: rajawali Pers, 2017), h.7.

menggunakan modal tersebut menurut hendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shohibul maal*. Syarat-syarat itu, misalnya harus berdagang dengan barang-barang tertentu saja, di laksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.<sup>46</sup>

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*ristriced*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.<sup>47</sup>

#### e. Pelaksanaan Sistem Point

Sistem *point* di Restoran Garuda dalam pelaksanaannya, pemilik memberikan pemahaman mengenai sistem ini sebagai suatu sistem kerja sama, antara pemilik dengan pengelola rumah makan, tetapi juga sistem ini di terapkan dengan para karyawan. Di mana sistem kerja dari *point* ini adalah membagi keuntungan

---

<sup>46</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hove, 1994), h.1197.

<sup>47</sup>Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.52.

antara pemilik dan pengelola serta karyawan dengan presentase 50% : 50%, dalam kurun waktu 2 bulan (60 hari) kerja.<sup>48</sup>

Sejalan dengan pemahaman di atas, pengelola memaparkan sistem *point* ini sebagai suatu sistem kerja terpadu dari pemilik modal, pengelola, dan karyawan dengan menentukan tenggang waktu selama 60 hari kerja dalam pembagian hasil.<sup>49</sup> Berbeda dengan (karyawan), memberikan pemahaman tentang sistem *point* sebagai suatu sistem kerja gotong royong, karena rumah makan Restoran Garuda bukan hanya dimiliki oleh pemilik dan pengelola, namun memberikan hak kepada karyawan untuk berkreasi demi memajukan Restoran Garuda sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.<sup>50</sup>

#### **f. Prinsip-prinsip Akad *Mudharabah***

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub sistem dari *musaqoh*. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengelola.

---

<sup>48</sup> Zulhelfi, wawancara dengan ayu wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 13 Juli 2020.

<sup>49</sup> Gimantoro, wawancara dengan ayu wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 13 Juli 2020.

<sup>50</sup> Zasna Dea, wawancara dengan ayu wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 8 Juli 2020.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha tersebut, dan pengelola setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usaha dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.<sup>51</sup>

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah.

Prinsip-prinsip *mudharabah* dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap pegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah

---

<sup>51</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h.84.



dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* al-Qur'an dan sunnah. *Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (palit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian ini disebabkan konsekuensi dari bisnis.<sup>52</sup>

## 2) Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Salain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Untuk itulah dalam bentuk kerjasama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.<sup>53</sup>

## 3) Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akad kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup, khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan, bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa

---

<sup>52</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h.10.

<sup>53</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.14

mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan mengalihkan modal yang dia memiliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerjasama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, di sisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.<sup>54</sup>

#### 4) Prinsip keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerjasama *mudharabah*. Hal ini di lihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apa bila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian *skill*,

---

<sup>54</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah*, Jus II (Mesir: Tiariyah Qubra), h.48.

dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas mengenai prinsip-prinsip *mudharabah*, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

#### **g. Hikmah Disyariatkan Akad *Mudharabah***

Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan.

Karena syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujud kerjasama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jadi hikmah disyari'atkan *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan

kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong.

*Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyari'atkannya *mudharabah* yang dikehendaki *syar'i* yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*ukhuwah*) dan rasa tolong-menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umah Islam dalam satu masyarakat dapat dihindarkan. Manfaat dari *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong, dan kepedulian terhadap sesama.
- 2) Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
- 3) Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal.

- 4) Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.
- 5) Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.<sup>55</sup>

Hak dan kewajiban *shahibul maal* dan *mudharib* di antaranya sebagai berikut :

a) Hak dan kewajiban pemilik modal.

- (1) Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 100%.
- (2) Pemilik modal memiliki hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.
- (3) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.
- (4) Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.
- (5) Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya operasional seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama.

---

<sup>55</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.157.

(6) Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami kerugian maka pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) Hak dan kewajiban pekerja.

Menurut Imam Syafi'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena, *mudharib*, kelak akan mendapatkan keuntungan, dan ia tidak berharap mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak, maka akad *mudharabah* ini hukumnya *fasid*.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *mudharib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan maupun pakaian. Madzhab Hanabilah memberikan keleluasaan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dan akad.

Menurut Hanafi'yah, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* untuk memenuhi kegiatan usaha yang meliputi : makan, minum, pakaian, dan juga biaya dokter.



Semuanya ini diperlukan demi kelancaran usaha yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku di khalayak umum.

Biaya yang dikeluarkan oleh *mudharib* (dalam menjalankan usaha) akan dikurangi dari keuntungan, namun jika tidak ada keuntungan, akan dikurangkan dari aset *shahibul maal* dan dihitung dari kerugian. Jika *mudharib* melakukan perjalanan usaha dan menetap selama 15 hari maka biaya perjalanan usaha ini diambil dari aset *mudharabah*. Jika *mudharabah* menggunakan biaya pribadi maka akan menjadi utang dan akan dikurangkan dari aset *mudharabah*. Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan, namun jika usaha yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudharib* menyerahkan aset yang diserahkan *shahibul maal* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Hanafi'iyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil usaha, tanpa harus dihitung dari keuntungan (*revenue sharing*). Akan tetapi, para ulama sepakat *mudharib* harus mengembalikan pokok harta

*shahibul maal*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *shahibul maal*.<sup>56</sup>

#### **h. Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Menurut Wahbah Zuhayali, pada prinsipnya kontrak kerjasama dalam pemodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam pemodalan (*shohibul maal*) murtad, begitu juga dengan modal (*mudharib*). Selain itu, Wahbah Zuhayli mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Akad *mudharabah* ini *fasid*, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari pemburuan, keuntungan ini semua milik *shohibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dengan keuntungan yang didapat bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul maal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.<sup>57</sup>

Hendi Suhendi menjelaskan, bahwa perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indosia, 2010 ), h. 144-155.

<sup>57</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.148.

- 1) Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah karena tindakannya, atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
- 3) Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal duni, *mudharabah* menjadi batal.<sup>58</sup>

Di dalam buku Rachmat Syafe'i, *Mudharabah* dianggap berakhir pada hal sebagai berikut :

- a) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.
- Mudhrabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan, dan pemecatan.

---

<sup>58</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.143

Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan. Pengusaha (*mudharib*) diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- b) Salah seorang *akid* meninggal dunia. Jumhur ulama' berpendapat, bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *akid* meninggal dunia, baik pemilik maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.
- c) Salah seorang *akid* gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
- d) Pemilik modal *murtad*. Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelinya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan

muusuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

- e) Modal rusak di tangan pengusaha. Jika itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha.

*Mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan. *Mudharabah* berakhir atau batal apa bila perkara-perkara sebagai berikut:

1. Pembatalan akad, ketika salah seorang dari kedua belah pihak membatalkan akad, *mudharabah* menjadi berakhir, karena *mudharabah* bersifat tidak mengikat.
2. Gila atau pingsan, ketika salah seorang dari kedua pihak yang mengadakan akad berubah menjadi gila atau pingsan *mudharabah* menjadi berakhir.
3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* tidak dapat diteruskan, karena *mudharabah* tidak bersifat mengikat.<sup>59</sup>

Dalam hukum positif dalam melaksanakan suatu perjanjian terdapat 2 teori yaitu sebagai berikut :

---

<sup>59</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),h.237.

### 1) Teori Kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam, secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.<sup>60</sup> Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu di lihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orangatau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-

---

<sup>60</sup>Dalam Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h, 16



pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di mana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>61</sup>

Menurut Riduan Syahrani, bahwa “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan”. Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu :

#### 1) Teori Ucapan (*Uttings Theorie*)

Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia

---

<sup>61</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*(Bandung: Alumni, 2000), h. 214.

menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu tidak adanya kepastian hukum, karena pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

## 2) Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Di kirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini, yaitu kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menunda-nunda untuk mengirimkan jawaban.

## 3) Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

## 4) Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang

menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini, antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.<sup>62</sup>

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, di mana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdato yang mengatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan”. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 33-41.

<sup>63</sup> Subekti dan Titrosuibio, *KUHPerdato* (Jakarta: Paramita, 1974), h. 15.

## 2) Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa, "...hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional." Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>64</sup>

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia, manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin

---

<sup>64</sup>Mohamad Anurrohim, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 4 Juli 2020 h. 6-7.

kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

Pada hakekatnya, menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.<sup>65</sup>

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”<sup>66</sup>

## **2. Konsep *Ijarah* dan Masalahnya**

### **a. Pengertian *Ijarah***

Upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *Ijarah*. Sedangkan *ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa ataupun upah mengupah. Oleh karena itu,

---

<sup>65</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 160.

<sup>66</sup>Mohamad Anurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan....”, h. 7.

untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam realtif sedikit.

Upah menurut bahasa Arab disebut “*al-ujrah*” berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-tsawab*” atau (pahala) dinamai *ajru* (upah).<sup>67</sup>

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah di perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.<sup>68</sup>

Definisi *ijarah* yang dikemukakan olah para ulama fiqih yaitu:

a) Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بِعَوَاضٍ

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.

b) Ulama Asy-Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْضُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَا بَلَاءَ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

c) Ulama Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْتُؤَلَانِ

<sup>67</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13* (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h. 15.

<sup>68</sup>Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*(Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan.”

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagaimana pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>69</sup>

Dari beberapa penjelasan upah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah ialah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukannya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan bersama.

#### **b. Dasar Hukum Ijarah**

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya upah mengupah (*ijarah*) dalam Islam yaitu:

##### **1. Al-Qur'an**

a) Q.S An-Nahl (16):97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

<sup>69</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1108.



Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

b) Q.S. Ath-Thalaq (65): 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

Ayat di atas menjelaskan tentang apabila seseorang telah memberikan jasa seperti menyusukan anakmu maka segerakanlah berikan upahnya kepada mereka.

c) Qs. Al-Qashash (28): 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَحْجِرَ أَلْقَايُ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) ia berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia seorang sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

“Dia (Syeikh Madyan), berkata, Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun Dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang anak yang meminta ayahnya agar mengangkat Musa sebagai pekerja, untuk memperkerjakan yang dapat dipercaya lalu membayarkan upahnya yang telah disepakati di awal akad.

## 2. Al-Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).

Hadist di atas menjelaskan bahwa segerakanlah melunasi hak seorang yang sudah bekerja setelah selesai pekerjaannya.

### 3. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi umat manusia.<sup>70</sup>

#### c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun *ijarah* yaitu :

- a) *Mu'jar* (orang atau barang yang di sewakan).
- b) *Musta'jir* (orang yang menyewa).
- c) *Sighat* (Ijab dan qabul).
- d) Upah dan manfaat.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'ar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.

#### a) Rukun *Ijarah*

Menurut Jumhul Ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

- (1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa-menyewa yaitu, *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* seseorang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* seseorang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

Seseorang yang sudah berakad *ijarah* diisyaratkan untuk mengambil suatu manfaat barang yang akan dijadikan sebuah

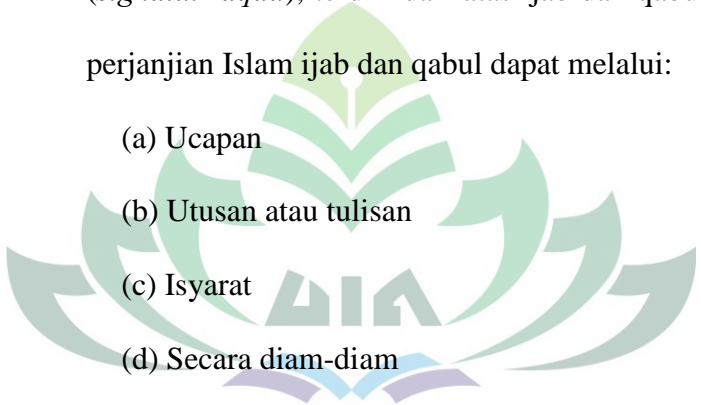
---

<sup>70</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 123-124.

akad sehingga nantinya dapat mencegah terjadinya suatu perselisihan. Dan untuk kedua belah pihak yang sudah melakukan akad disyariatkan berkemampuan yaitu, keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil belum *baligh* dan belum dapat membedakan maka akad menjadi tidak sah.<sup>71</sup>

(2) *Shighat Akad.*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat akad* (*sighatul 'aqad*), terdiri dari atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hikmah perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui:

- 
- (a) Ucapan
  - (b) Utusan atau tulisan
  - (c) Isyarat
  - (d) Secara diam-diam
  - (e) Dengan diam semata.<sup>72</sup>

Di dalam hukum Islam *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>73</sup> Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijab*. Sedangkan syarat-syaratnya

<sup>71</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: pena Ilmu dan Amal, 2006), h.205.

<sup>72</sup>Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grando Persada, 2007), h. 136.

<sup>73</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.63.

sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

Apabila ijab dan qabul telah memenuhi persyaratannya, terwujudlah perizinan timbal balik yang direpresentasikan oleh ijab dan qabul sehingga substansi rukun kedua dari akad pun terpenuhi.<sup>74</sup>

### (3) *Ujrah* (upah)

Penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, naik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. *Ujrah* (upah) dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

(a) Upah yang telah disebutkan (*ajr-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).

(b) Upah sepadan (*ajr- al-mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>75</sup>

Selain itu upah yang diberikan berupa harta yang secara syar'i bernilai dan upah hendaknya diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam

<sup>74</sup>Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa', 2005), h.378.

<sup>75</sup>Nurur Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta:Kencana, 2013), h.230.

upah mengupah. Pemberian upah atau imbalan dalam *ujrah* mestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>76</sup>

#### (4) Manfaat

Untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang yang diakadkan) yakni dengan cara menjelaskan manfaatnya terlebih dahulu, dengan menjelaskan pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan yang dimaksud, jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>77</sup>

#### b) Syarat *ijarah*

Syarat-syarat *ijarah* yaitu :

- 1) Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- 2) Menyatakan kerelaannya untuk melakukan *ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna.
- 4) Objek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
- 5) Objek *ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan merupakan suatu yang bisa disewakan.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h.118.

<sup>77</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h.126.

- 7) Upah atau sewa dalam akad harus jelas dan sesuai dengan yang bernilai harta.

Mengenai syarat-syarat *ijarah*, Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut :

- a) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan cari yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga (baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa).
- d) upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai di sini adalah dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.



- f) barang pengganti upah yang diberikan cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi ataupun berbau kurang sedap.<sup>78</sup>

#### **d. Macam-Macam *Ijarah***

Dari segi objeknya, akad *al-ijarah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) *Ijarah* yang bersifat manfaat

Misalnya seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewanya.

2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti dibolehkan asalkan yang dikerjakan jelas pekerjaannya, seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah*

---

<sup>78</sup>Taqiuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gus, 1996), h.103.

terhadap pekerjaan ini hukumnya boleh atau diperbolehkan.<sup>79</sup>

**e. Hak dan Kewajiban *Musta'jir* dan *Mu'ajir***

Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*), dan memperoleh pembayaran sewa dan atau biaya lainnya dari penyewa (*musta'jir*). Dan mengakhiri akad *ijarah* dan menarik objek *ijarah* apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.

Kewajiban perusahaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajir*) antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan objek *ijarah* yang disewakan.
2. Menanggung biaya pemeliharaan objek *ijarah*.
3. Menjamin objek *ijarah* yang disewakan, tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Hak penyewa (*musta'jir*) antara lain sebagai berikut :

- a) Menerima objek *ijarah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan.
- b) Menggunakan objek *ijarah* yang di sewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.

Kewajiban penyewa (*musta'jir*) antara lain meliputi :

- a) Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.

---

<sup>79</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236.

- b) Mengembalikan objek *ijarah* apabila tidak mampu membayar sewa.
- c) Menjaga dan mempergunakan objek *ijarah* sesuai yang diperjanjikan.
- d) Tidak menyewakan kembali dan atau memindah tangankan objek *ijarah* kepada pihak lain.

**f. Berakhirnya Akad *Ijarah***

Akad *ijarah* akan berakhir karena beberapa hal yaitu :

1. Objek atau bendanya hilang atau musnah, seperti kontrakan atau rumah terbakar ataupun sepatu yang dititipkan hilang.
2. Habis tenggang waktu yang disepakati, seperti kontrakan apabila kontrakan ini sudah habis waktunya maka kontrakan ini di kembalikan ke pemilik aslinya, seperti kesepakatan di awal akad yang sudah disepakati bersama antar kedua belah pihak. Kedua penjelasan di atas disepakati oleh ulama.<sup>80</sup>

Menurut Mazab Hanafi, akad ini berakhir apabila salah seorang itu meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur Ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan. Dan sedangkan menurut Mazhab Hanafi, apabila ada udzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur Ulama melihat, bahwa udzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya atau barangnya

---

<sup>80</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h.283.

mengandung cacat atau manfaatnya hilang karena terbakar atau dilanda banjir.<sup>81</sup>

### 3. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan permasalahan, yang boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peneliti, maka peneliti akan melampirkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diangkat peneliti. Berikut merupakan penelitian sebelumnya berupa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti:

1. Zeliana Tri Utari, 2015, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian peneliti memiliki kesimpulan bahwa, tinjauan hukum Islam tentang pengupahan dengan sistem bagi hasil ini jika dilihat dari segi objeknya, upah mengupah ini termasuk upah mengupah yang sah, karena terpenuhinya rukun

---

<sup>81</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237-238.

upah mengupah. Namun dalam pelaksanaan pengupahan berdasarkan hasil yang dilakukan masih ada kesenjangan teori hukum Islam. Yang mana praktik pengupahan terhadap karyawan belum memenuhi syarat *Ijarah* seperti akad yang masih dilakukan dalam bentuk lisan dan upah yang diterima karyawan belum jelas dan dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan menurut peneliti hal tersebut tidak boleh, karena merugikan karyawan yang bekerja.<sup>82</sup>

2. Hananah Wardah, 2012, dengan skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” skripsi ini mengkaji tentang akad perjanjian dan akad pelaksanaan Sistem bagi hasil pada nelayan dalam meningkatkan penghasilan ekonomi para nelayan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Morodemak masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat di desa Morodemak tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut jika nelayan (anak buah) ingin ikut melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang

---

<sup>82</sup>Zeliana Tri Utari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2015).

mengikat. Menurut hukum Islam praktek di Desa Morodemak menggunakan sistem *Mudharabah* namun praktek di lapangan tidak sesuai sistem *Mudharabah* yang mana biaya-biaya yang diperlukan saat melaut dan biaya-biaya pemeliharaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal menjadi tanggung jawab bersama.<sup>83</sup> Penelitian ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti baik itu dari segi lokasi maupun pembahasan yang akan dibahas.

Selain dari hasil penelitian dalam bentuk skripsi tersebut, dikemukakan beberapa jurnal ilmiah yang membahas tentang bagi hasil dan sebagainya.

1. Esy Nur Aisyah, 2013, dalam jurnal penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan” dalam tulisan ini peneliti mendeskripsikan tentang penerapan sistem bagi hasil, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya bagi hasil di Bmt MMU pasuruan. Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama mananggung resiko. *Shahibul Maal* (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya.

---

<sup>83</sup>Hananah Wardah, “*Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014).

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak, tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.

Sistem bagi hasil yang diterapkan MBT MMU pada tabungan mudharabah dan mudharabah berjangka adalah mengaju pada prinsip *profit sharing*. Kemudian dalam penetapan pembagian nisabah bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (mudharib), maka bahwa faktor- yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil adalah : (1) faktor langsung, yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositkan dan besarnya nisbah bagi hasil. (2) faktor tidak langsung, yaitu jumlah pendapatan dan kebijakan akunting di BMT MMU pasuruan.<sup>84</sup>

2. Rizal Darwis, 2016, dalam jurnal penelitian yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” tulisan ini mengkaji tentang sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo perseptif

---

<sup>84</sup>Esy Nur Aisyah, El-Dinar, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan” Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang, El-Dinar, Vol 1, No 1, Januari 2013, h. 3-8.



hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.

Berbagai bentuk dan jenis pertanian dan industri, seni dan kerajinan telah dipraktikkan pada masa Rasulullah saw. Salah satu bentuk bisnis yang dibolehkan oleh Rasulullah saw adalah membolehkannya seseorang memproduksi tanah bagi pemilik tanah yang tidak mampu memproduksi tanahnya dengan perjanjian bagi hasil. Sistem pembagian hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah saw dalam rangka mensejahterakan umat manusia.

Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad. Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil yang umumnya terjadi dipedesaan.

Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali asalkan sistem bagi hasil itu diterapkan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam

produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah disatu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya sistem bagi hasil petani penggarap di Kabupaten Gorontalo adalah memberikan dampak positif, di mana pendapatan penghasilan yang memadai untuk menafkahi keluarganya, sehingga taraf perekonomian masyarakat petani penggarap dapat terangkat pula adanya.<sup>85</sup>

Berdasarkan dari penelitian skripsi dan jurnal di atas, bila dikritisi secara keseluruhan ternyata terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji objek tentang bagi hasil. Perbedaannya yaitu (1) Skripsi Zeliana Tri Utari, 2015, mengkaji tentang praktik pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan dalam bentuk sistem bagi hasil dan pemberian fasilitas kepada karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa dari segi objeknya, upah mengupah ini sah, karena terpenuhinya rukun upah mengupah. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil yang dilakukan masih ada kesenjangan teori hukum Islam yang mana praktik pengupahannya belum memenuhi syarat *ijarah* seperti akad yang masih dilakukan secara lisan dan upah yang diberikan belum jelas. (2) Hananah

---

<sup>85</sup>Rizal Darwis, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam," <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, Al-Mizan, Vol. 12 No. 1, Juni 2016, h. 1-25.

Wardah, 2012, megkaji tentang akad perjanjian dan akad pelaksanaan sistem bagi hasil pada nelayan dalam meningkatkan penghasilan ekonomi para nelayan. Hasil penelitian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil didesa morodemak masih menggunakan kebiasaan secara turun temurun. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan. Menurut hukum Islam praktik bagi hasil di desa morodemak menggunakan sistem mudharabah namun praktek di lapangan tidak sesuai dengan sistem mudharabah. Di mana biaya-biaya yang diperlukan melaut dan biaya pemeliharaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal menjadi tanggung jawab bersama.

Sedangkan dari persamaan dan perbedaan hasil penelitian sekripsi dan jurnal di atas, penelitian ini ternyata tidak sama, karena penulis setresingnya akan meneliti tentang praktik akad bagi hasil dengan sistem point dan ternyata dari semua peneliti melihat tidaklah sama. Penulis ingin mengetahui praktik bagi hasil dengan sistem *point* yang diterapkan di Restoran Garuda Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSAKA

### Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daruq Haq, 2008.
- Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: rajawali Pers, 2017.
- Abd al-Hamid Hakim, *al-Bayan*, Juz ke III, Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 2004.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, cetakan Ke-1 Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiwih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Chairuman Pasaribuan, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1994.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: rajawali Press, 2010.

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontempore*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ismail Muhammad Syeh, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Jalal ad-Din as-Suyuthi, *al-asybah wa an-Nazhair fi'al-Furu'*, Surabaya-Indonesia: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhan wa Auladuh.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung, 2016.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2002.

Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perseptif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, cetakan Ke-13, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Muhammad Usman Tsubair, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mua'amat al-Maliyyah*, Yordania : Dar an-Nafais, 1423 H/2004.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Nurur Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2013.

Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Wali, 1992.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Sohari suhari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 1992.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Salim H.S, *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy Syifa', 2005.

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grando Persada, 2007.

Taqiuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gus, 1996.

### **Jurnal**

Esy Nur Aisyah, El-Dinar. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan, *Jurnal fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang*, Vol. 1 No. 1, Januari 2013.

Rizal Darwis. Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1, Juni 2016.

### **Wawancara**

Gimantoro, wawancara dengan Ayu Wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 13 Juli 2020.

Hadi Iswandi, wawancara dengan Ayu Wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 13 Juli 2020.

Hakim, wawancara dengan Ayu Wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 11 Juli 2020.

Indri Yasmine, wawancara dengan Ayu Wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 8 Juli 2020.

Jodi Kurniawan, wawancara dengan Ayu Wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 9 Juli 2020.

Rina Agustina, wawancara dengan Ayu Wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 17 Februari 2020.

Zulhelfi, wawancara dengan Ayu Wulandari, Restoran Garuda, Bandar Lampung, 13 Juli 2020.